

**IMPLEMENTASI TUKAR GULING TANAH WAKAF DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA BETOYOGUCI KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

Oleh :

ROBIATUL ADAWIYAH

NIM.C07216021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Robiatul Adawiyah

NIM : C07216021

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Tukar Guling Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Betoयोगuci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 3 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Robiatul Adawiyah

NIM. C07216021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah NIM.C07216021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Juli 2020

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP.197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah NIM. C07216021 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi dan Manajemen.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

Penguji II

Sabki, SHI, MHI
NIP.197404042007101004

Penguji III

Fatikul Himami, MEI
NIP.198009232009121002

Penguji IV

M. Maulana Asef, Lc., M.H.I
NIP.198709042019031005

Surabaya, 15 September 2020
Mengatakan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Robiatul Adawiyah
NIM : C07216021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : robiatuladawiyah012015@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI TUKAR GULING TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BETOYOGUCI KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2021
Penulis

(Robiatul Adawiyah)

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Dalam sejarah Islam wakaf telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw, dimana pada saat itu Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar¹⁰:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَيْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلَهَا، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. {رواه المسلم}

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa Umar bin Khattab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan untuk tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah saw bersabda: “jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil harta tersebut”. (HR. Imam Muslim).¹¹

Banyak ulama yang sepakat bahwa yang telah dilakukan Umar bin Khattab tersebut sebagai bentuk dari wakaf, dimana ia menahan harta aslinya

⁹ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: 2007), 3.

¹⁰ Nunik Hamidah, *Kasus Istibdal (Tukar Guling) Tanah dan Rumah Wakaf di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (Analisis Hukum Islam)*, 3.

¹¹ Al Imam Abi Al Husaini Muslim ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim Juz II*, 70.

Mengganti benda wakaf agar lebih produktif menjadi salah satu hal yang masih diperdebatkan dikalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, harta wakaf tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 huruf f. Namun dalam pasal 41 ayat 1 disebutkan pengecualian penukaran harta benda wakaf jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). Kemudian dijelaskan dengan ayat-ayat selanjutnya yang berbunyi bahwa perubahan tersebut boleh dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai penggantian benda wakaf dalam hukum Islam. Sebagian ulama melarang penggantian benda wakaf karena menurut mereka wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diganti dengan sesuatu yang lain. Mereka berpendapat demikian karena mereka menyesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad tentang wakaf tanah di Khaibar milik Umar bin al-Khattab. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengizinkan penggantian benda wakaf dengan salah satu syarat yaitu penggantian tersebut karena keadaan darurat dan apabila penggantian benda wakaf tidak dilakukan, akan mengakibatkan benda wakaf tersebut hilang atau tidak memberikan manfaat lagi.

Dengan adanya pendapat ulama yang memperbolehkan penggantian benda wakaf, tentu penggantian benda wakaf dapat dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dan tetap menjaga wakaf tersebut. Namun kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang masih

4. Musyfikah Ilyas, 2016.¹⁶ “*Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tukar guling tanah wakaf menjadi solusi terakhir dalam menghadapi keadaan dimana harta benda wakaf sudah tidak dapat memberikan manfaat lagi. Dengan adanya tukar guling diharapkan dapat menjadi jalan untuk tetap melestarikan harta benda wakaf tersebut. Sebagian besar ulama memperbolehkan tukar guling pada harta benda wakaf selama wakaf tersebut benar-benar tidak dapat memberikan manfaat lagi.
5. Fitriatus Sholikha, 2012.¹⁷ “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami’ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengalihan tanah wakaf seluas 1,155 m² yang di atasnya sedang dilakukan pembangunan masjid. Namun dalam proses perwakafan tersebut terdapat kesalahan dari pihak wakif, dikarenakan ia tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ahli waris menggugat tanah wakaf tersebut lantaran sebelumnya tanah tersebut telah diberikan kepadanya. Sehingga pembangunan masjid tersebut dialihkan pada tanah lain seluas 1,220 m².

¹⁶ Musyfikah Ilyas, *Istibdāl Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam* (Jurnal—, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

¹⁷ Fitriatus Sholikha, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami’ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*(Skripsi—, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

				kendala yang dihadapi dalam pengalihan tanah wakaf di Desa Betoयोगuci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2	Fahrurroji, 2017	<i>Istibdāl</i> Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya	Membahas tentang tukar guling tanah wakaf	Fahrurroji: Penelitian ini membahas mengenai hukum pengalihan tanah wakaf secara keseluruhan dan model-model yang dapat digunakan dalam pengalihan tanah wakaf Peneliti: Penelitian saat ini membahas mengenai proses pengalihan tanah wakaf yang ada di Desa Betoयोगuci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan analisis Perspektif hukum Islam
3	Nunik Hamidah, 2013	Kasus <i>Istibdāl</i> (Tukar Guling) Tanah dan Rumah di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (Analisis Hukum Islam)	Meneliti mengenai proses tukar guling harta benda wakaf	Nunik Hamidah: Obyek penelitian terdahulu terletak di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Peneliti: Obyek penelitian terletak di Desa Betoयोगuci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
4	Musyfikah	<i>Istibdāl</i> Harta	Membahas tentang	Musyfikah Ilyas:

	Ilyas, 2016	Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam	tukar guling wakaf	<p>Penelitian ini membahas mengenai hukum pengalihan tanah wakaf dari segi hukum Islam tanpa menggunakan studi kasus secara langsung</p> <p>Peneliti: Penelitian menggunakan studi kasus secara langsung</p>
5	Fitriatus Sholikha, 2012	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Meneliti mengenai pengalihan tanah wakaf	<p>Fitriatus Sholikha: Menggunakan analisis dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang</p> <p>Peneliti: Menggunakan analisis dari perspektif hukum Islam</p>
6	Moh. Zuaim Ajda, 2009	Analisis Hukum Islam tentang Penggantian Harta Benda Wakaf Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo	Meneliti mengenai pengalihan tanah wakaf dengan analisis hukum Islam	<p>Moh. Zuaim Ajda: Membahas Penggantian Harta Benda Wakaf Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Porong Sidoarjo</p> <p>Peneliti: Membahas tentang implementasi tukar guling tanah wakaf yang ada di Desa Betoযোগুচি Kecamatan Manyar</p>

keadaan yang merdeka (tidak seorang budak), karena harta seorang budak ialah milik tuannya sebagai wakil darinya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa, seorang budak boleh berwakaf selama telah mendapatkan izin dari tuannya.

- 2) Berakal sehat, wakaf dihukumi tidak sah, apabila dalam melakukan wakafnya tidak dalam kesadaran yang sempurna. Seperti wakaf yang dilakukan oleh orang gila, orang lemah ingatannya, sakit, maupun kecelakaan.
- 3) Dewasa, seseorang yang belum dewasa dikatakan tidak sah wakafnya karena mereka belum memiliki kecakapan dalam melakukan akad dan menggugurkan hak miliknya. Sehingga wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.
- 4) Tidak berada di bawah tekanan atau pengampunan

Orang yang berada dibawah pengampunan atau orang yang boros dianggap tidak sah wakafnya, karena dipandang tidak piawai dalam berbuat kebaikan. Namun apabila tujuan wakaf tersebut ialah agar hartanya tidak dibelanjakan untuk hal yang tidak baik dan menjaga agar tidak

3. Setelah menerima surat permohonan dari KUA, kepala DEPAG membentuk tim penilai, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Bupati/Walikota untuk dibuatkan Surat Keputusan.
4. Setelah dilakukan penilaian, Kepala DEPAG Kabupaten/Kota meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (KANWIL DEPAG) dengan menyertakan lampiran hasil penilaian, kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri.
5. Setelah memperoleh surat persetujuan tertulis dari Menteri, nazhir harus melaporkan ke Kantor Pertanahan untuk pendaftaran penggantian nama lebih lanjut.

Namun dalam melaksanakan tahap-tahap ini nazhir menunjuk notaris Kamiliah untuk pendaftaran penggantian tanah wakaf tersebut, hal ini dilakukan lantaran pada saat penggantian wakaf, nazhir yang bertugas sudah lanjut usia, sehingga tidak mampu untuk melakukan pengajuan sendiri. Pengajuan penggantian ini telah dilakukan sejak tahun 2013.

Walaupun dalam pengajuan ini nazhir tidak melakukan sendiri, namun jika dilihat dari penjelasan nazhir pada bab III, proses penggantian tanah tambak wakaf ibu Sacjihah telah memenuhi prosedur yang telah disebutkan di PP RI No. 42 Tahun 2006 Pasal 51. Akan tetapi hingga saat ini nazhir belum menerima SK perizinan tukar guling tanah wakaf dari Menteri, meskipun proses penggantian tanah wakaf ini telah berjalan selama 6 Tahun.

Menurut pandangan penulis, alasan dilakukannya penggantian tanah tambak wakaf milik ibu Sachijah ini telah sesuai dengan persyaratan yaitu berdasarkan kemaslahatan bersama. Dimana tanah tambak wakaf awal tidak dapat memberikan kemanfaatan untuk pengembangan masjid, sedangkan tanah pengganti, memiliki kemanfaatan sebesar Rp. 14.000.000,- pertahun. Hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya penggantian, agar pengembangan masjid Baiturrahman dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan jika melihat dari kesesuaian proses penggantian, penggantian tanah tambak wakaf ibu Sachijah telah sesuai dengan proses yang harus dipenuhi untuk pengajuan penggantian wakaf menurut prosedur yang ada.

Namun jika melihat dari luas tanah pengganti yang jauh lebih besar dari luas tanah awal, tentu NJOP tanah tambak pengganti jauh lebih besar dari NJOP tanah tambak awal, sehingga biaya pembelian tanah pengganti lebih mahal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai dana untuk tambahan biaya pembelian tanah pengganti. Namun, karena keterbatasan penulis, penulis tidak dapat memperoleh data mengenai sumber dana tambahan untuk pembelian tanah pengganti tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Permasalahan mengenai hukum tukar guling tanah wakaf, penulis membahasnya dalam dua perspektif, yaitu dari perspektif hukum positif

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak melanggar prinsip Syariah.
- b. Harta benda wakaf awal sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Pertukaran ini dilakukan karena dalam keadaan mendesak.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 juga disebutkan, pengganti harta benda wakaf awal harus memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti harta benda wakaf harus lebih tinggi atau minimal senilai dengan harta benda wakaf awal. Pengganti harta benda wakaf juga harus berada di wilayah yang strategis, sehingga mudah untuk dikembangkan

Kasus peralihan atau penggantian tanah wakaf yang ada di Desa Betoyoguci ini dilakukan berdasarkan keinginan nazhir dan ahli waris wakif sendiri. Hal tersebut dikarenakan tanah wakaf tambak ibu Sachijah sudah tidak dapat bermanfaat lagi. Penyebab kurang bermanfaatnya tanah tambak tersebut karena kurangnya pengairan jika dimusim kemarau dan lokasi awal yang berada di dekat Sofwel batubara.

Menurut pengamatan penulis, penggantian tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan ahli waris merupakan pengambilan langkah yang tepat, karena apabila tidak dilakukan penggantian,

Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan penggantian benda wakaf, bahkan mereka terkesan lebih mempermudah izin pengantiannya. Menurut mereka, jika mereka melarang penggantian barang wakaf sedangkan ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang yang menyianyikan harta benda wakaf dan akan berimbas pada kerusakan benda wakaf. Dari pendapat kedua imam tersebut, maka peralihan (penggantian) harta benda wakaf sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Jika melihat dari permasalahan yang ada di Desa Betoyoguci, tambak wakaf milik ibu Sachijah yang seluas 4.680 m² termasuk tanah wakaf yang kurang produktif, tambak tersebut telah lama tidak dapat digunakan lantaran kurangnya pasokan air dan letak lokasi yang berdekatan dengan sofwel batubara. Hal tersebut mengakibatkan air tambak tercemar batubara dan produksi yang terus menurun. Keadaan inilah yang menjadi alasan nazhir untuk melakukan penggantian, apabila tidak dilakukan penggantian, dikhawatirkan wakaf dari ibu Sachijah akan mati.

Selain karena tambak wakaf awal kurang produktif, alasan lain dilakukannya penggantian adalah luas tanah pengganti lebih besar dari tanah awal, yaitu sekitar 20.540 m² dan 21.600 m². Tanah pengganti ini juga lebih produktif dibandingkan dengan tanah wakaf awal, karena dalam pengairannya tambak pengganti

bukan hanya menggunakan air tawar saja, melainkan juga menggunakan air asin, sehingga jika dalam musin kemarau tambak tersebut tetap dapat berproduksi.

Menurut penulis, kasus tukar guling tanah wakaf yang ada di Desa Beyotoguci telah memenuhi persyaratan penggantian berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Dimana menurut mereka, tukar guling harta benda wakaf diperbolehkan selama benda wakaf sudah tidak dapat memberikan manfaat atau terdapat pengganti yang lebih baik. Sedangkan kasus tanah tambak wakaf yang ada di Desa Betoyoguci tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat lagi dan dikhawatirkan akan menyebabkan matinya wakaf jika tidak dilakukan penggantian.

Pada akhirnya dengan melakukan penggantian tanah wakaf ini, nazhir juga ikut serta menjaga nilai dan manfaat wakaf ibu Sachijah agar tetap produktif, sehingga manfaat dari wakaf ibu Sachijah dapat digunakan untuk pengelolaan Masjid Baiturrahman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian penulis mengenai implementasi tukar guling tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam di Desa Betoयोगuci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penggantian tanah wakaf yang dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf milik ibu Sachijah seluas 4.680 m² ditukar dengan tanah milik H. Ma'ruf Pak Sanusi seluas 20.540 m² dan 21.600 m². Dilihat dari segi proses pengajuan penggantian telah sesuai dengan PP RI nomor 42 Tahun 2006, dimana disebutkan bahwa penggantian harus sesuai dengan izin Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Alasan dilakukannya penggantian adalah untuk menjaga kelestarian harta benda wakaf ibu Sachijah, karena tanah tambak wakaf tersebut sudah tidak dapat dikembangkan dengan baik. Sehingga tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat untuk masjid Baiturrahman dan masyarakat sekitar lagi. Sedangkan tanah pengganti dapat memberikan kemanfaatan untuk masjid Baiturrahman maupun masyarakat.

